

# MENYOROTI ABREVIASI: Singkatan dan Akronim

Dra. Hj. Yeti Mulyati, M.Pd  
FPBS-UPI

## A. Pengantar

Di dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, multietnis, dan multikultur, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bahasa, baik dalam fungsinya sebagai alat komunikasi maupun sebagai disiplin ilmu menyediakan lahan yang amat luas untuk dikaji dan diteliti. Sifat arbitrer, konvensional, dan dinamis dari sebuah bahasa memungkinkan bahasa mengalami perubahan, Perubahan itu sendiri merupakan suatu gejala bahasa yang lazim terjadi.

Salah satu gejala bahasa yang muncul dalam kegiatan berbahasa berupa proses pemendekan atau abreviasi. Harimurti Kridalaksana (1992) mengklasifikasikan gejala bahasa hasil pemendekan itu ke dalam 5 kategori, yakni (a) singkatan, (b) penggalan, (c) akronim, (d) kontraksi, dan (e) lambang huruf. Sedangkan Notosusanto (1979) dan JS Badudu (1983) membaginya menjadi dua, yakni singkatan dan akronim.

Proses pemendekan yang menghasilkan singkatan dan akronim dapat berdampak positif dan dapat pula berdampak negatif. Bentuk-bentuk bahasa baru yang dihasilkan dari proses pemendekan, di satu sisi dapat memperkaya khasanah kekayaan bahasa, (baca: kosakata) jika dalam aplikasinya tidak menghambat proses komunikasi. Akan tetapi, jika hal itu dapat menghambat proses komunikasi maka seyogyanya kita mewaspadai dan menertibkannya sebagai bentuk dari upaya pengembangan dan pembinaan bahasa.

Dalam tatanan masyarakat kita (Indonesia) terdapat dua lembaga kenegaraan yang secara mencolok menunjukkan produktivitas pemakaian bahasa berupa singkatan dan akronim, yakni ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dan POLRI (Kepolisian Republik Indonesia). Padahal dalam konsep **ketahanan nasional (TANAS)**, kedua lembaga itu menduduki peranan yang vital di masyarakat. Produktivitas pemakaian bahasa di lingkungan kedua lembaga tersebut seolah-olah memunculkan register tersendiri yang bersifat khas sebagai gaya selingkung. Dengan kondisi ini, bukan hal yang mustahil para pemakai bahasa di luar lingkungan tersebut

tidak dapat memahami bahasa selingkung dimaksud, terutama yang berkaitan dengan bentuk singkatan dan akronim.

Tentang kekhawatiran pemakaian singkatan dan akronim yang tidak terkendali telah lama diwacanakan oleh salah seorang pakar bahasa kita, Sutan Takdir Alisjahbana, seperti yang ditulisnya dalam *Suara Karya*, Senin, 9 Desember 1985.

*Banjir akronim dan kependekan sekarang ini yang membuat kita sukar membaca surat kabar harus dibentung. Bahasa Indonesia oleh karenanya akan menjadi amat sulit, sebab tiap kependekan merupakan bentuk yang baru, sedangkan tidak ada isi baru di bawahnya, ingatan kita terlampau dibenahinya.*

Mungkin kekhawatiran S.Takdir Alisyahbana itu akan semakin bertambah jika dikaitkan dengan fenomena berbahasa melalui medium SMS (*Shot Massage Service*). Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi (termasuk teknologi komunikasi), pemakaian bahasa melalui SMS juga turut merangsang pertumbuhan gejala bahasa pemendekan. Karena alasan penghematan, para pemakai bahasa melalui medium SMS cenderung untuk melakukan pemendekan kata yang kadang-kadang dibuat secara personal-kontekstual. Meskipun demikian, register bahasa SMS yang mula-mula bersifat personal-kontekstual itu tidak jarang pula menjadi milik kolektif dan membentuk register khas bahasa SMS.

Lydia Irawati (2007) pernah menyoroti masalah *Singkatan dan Akronim dalam Media Chatting dan SMS (Analisis Komunikasi Teks dalam Internet dan Telepon Selular)*. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa singkatan-singkatan yang terbentuk pada media SMS atau *chatting* pada umumnya dibangun dengan cara menghilangkan unsur vokal pada kata yang disingkatnya.

Penelitian yang berjudul *Tinjauan Akronim dalam Bahasa Indonesia* juga dilakukan oleh Rudianto (1996) dengan mengambil sampel *Harian Umum Republika*. Hal senada dilakukan oleh Dian Alanudin (2003) melalui skripsinya yang berjudul *Bentuk-bentuk Singkatan Bahasa Indonesia pada Iklan Mini (Studi Kasus Pada Iklan Mini Kompas Tanggal 1-31 Agustus 2002)*. Temuan pentingnya adalah bahwa terdapat singkatan pada iklan mini tersebut yang memiliki beberapa makna atau pengertian yang berbeda dari makna umum yang sudah dikenal masyarakat.

Arinda Putri Wulandari pernah melakukan penelitian tentang *Penggunaan Akronim dan Singkatan dalam Bahasa Plesetan pada Acara Extravaganza dan Sketsa ABG*. Temuannya adalah makna akronim pada acara tersebut mengalami perubahan dari makna yang sudah dikenal secara umum.

Mengenai penggunaan bentuk abreviasi (singkatan dan akronim) di lingkungan masyarakat disinggung dalam Kongres Bahasa III oleh Nugroho Notosusanto melalui makalahnya yang berjudul "Masalah Akronim dan Singkatan dalam Perkembangan Bahasa Indonesia". Menurutnya, dari 11.562 akronim dan singkatan yang terdapat dalam *Kamus Singkatan dan Akronim*, sebanyak 2029 buah dipergunakan di lingkungan ABRI. Artinya, lembaga tersebut menggunakan singkatan dan akronim jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan bidang profesi lain.

Istilah yang terbentuk dari proses abreviasi yang digunakan di lingkungan ABRI itu kadang-kadang merupakan gaya selingkung yang belum terkodifikasikan dalam sistem kaidah pembentukan abreviasi yang bersifat umum. Dari sisi sosiolinguistik, gejala pemakaian bahasa yang berupa pemakaian singkatan dan akronim di lingkungan ABRI dan POLRI perlu diketahui masyarakat pemakai bahasa secara luas, mengingat peran pentingnya kedua lembaga itu di masyarakat. Dari sisi linguistik, studi tentang tatahubungan antara repertoar kebahasaan di satu pihak dan repertoar peranan kemasyarakatan di pihak lain yang terjadi di dalam suatu masyarakat bahasa dapat mengukuhkan pendapat Moeliono (1981) bahwa "perilaku kebahasaan sebenarnya cerminan perilaku kemasyarakatan". Bagaimanakah fenomena abreviasi ini dalam perkembangan bahasa Indonesia. Merupakan inti dari tulisan ini.

## **B. Ihwal Abreviasi dan Proses Pembentukan Kata**

Salah satu fenomena menarik dari perkembangan bahasa Indonesia adalah adanya gejala pemendekan atau abreviasi yang terjadi dalam berbagai bidang dan berbagai aktivitas sosial. Bahkan gejala ini sudah mewadiah dalam dunia politik sebagai ajang kampanye. Beberapa calon birokrat di berbagai tingkat seringkali memanfaatkan bentuk ini untuk kepentingan kampanye politik. Hasil abreviasi seringkali membentuk akronim yang dari sudut semantis merefleksikan makna positif. Coba saja kita perhatikan beberapa pasangan calon gubernur Jawa Barat tahun 2006 silam: Ahmad Heryawan dan

Dede Yusuf membentuk akronim nama menjadi *hade*; Dani Setiawan dan Iwan Sulanjana menjadi *da'i*; dan Agum Gumelar dan Nu.man Abdul Hakim menjadi *aman*. *Hade* dalam bahasa Sunda (bahasa daerah Jawa Barat) merujuk pada makna "bagus". berkonotasi positif. *Da'i* merujuk pada makna "kiyai, ulama". Secara semantis, makna kata tersebut berkonotasi positif. Demian juga dengan *aman* yang berarti "bebas gangguan, tertib".

Banyak alasan terjadinya fenomena abreviasi, terlebih-lebih dengan pesatnya laju teknologi informasi. Berkomunikasi melalui SMS, demi mengefektifkan tulisan orang lebih memilih bentuk-bentuk pemendekan, yang boleh jadi proses pemendekan tersebut bersifat personal, tidak berujukkan. Apa itu *abreviasi*, bagaimana kaitannya dengan proses pembentukan kata, bagaimana proses pembentukan abreviasi, dan apa saja jenisnya, akan kita coba bahas dalam tulisan ini.

Menurut Harimurti Kridalaksana, dalam kajian morfologis terdapat beberapa jenis proses pembentukan kata, yaitu *afiksasi*, *reduplikasi*, *komposisi (pemajemukan)*, *abreviasi*, *metanalisis*, *derivasi balik*, dan *morfofonemik*. Dari jenis-jenis proses pembentukan kata tersebut, tulisan ini hanya akan menyoroti masalah *abreviasi*. Abreviasi merupakan salah satu bentuk proses morfologis, yakni berupa penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga terjadilah bentuk baru yang berstatus kata (Kridalaksana, 2001: 1). Sementara itu, dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, abreviasi dijelaskan sebagai pemendekkan bentuk sebagai pengganti bentuk yang lengkap, atau bentuk singkatan tertulis sebagai pengganti kata atau frasa.

### **C. Jenis-jenis Abreviasi**

Abreviasi ini memiliki beberapa jenis atau bentuk, di antaranya *singkatan*, *penggalan*, *akronim*, *kontraksi*, dan *lambang huruf*. *Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan* yang diterbitkan oleh Pusat Bahasa membagi abreviasi ke dalam bentuk-bentuk berikut: **singkatan**, **akronim** dan **lambang huruf**. Sementara itu, Harimurti Kridalaksana membagi jenis abreviasi ini ke dalam lima bentuk, yaitu **singkatan**, **penggalan**, **akronim**, **kontraksi**, dan **lambang huruf**.

**Singkatan** ialah salah satu hasil proses pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf demi huruf (DKI, KKN) maupun yang tidak dieja huruf demi huruf (dll, dsb, dst). Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*,

singkatan dijelaskan sebagai bentuk hasil menyingkat (memendekkan), berupa huruf atau gabungan huruf. Sementara itu, menurut Drs. John S Hartanto istilah **singkatan** merujuk pada istilah yang dibentuk dengan menanggalkan satu bagian atau lebih. Dengan kata lain, singkatan merupakan bentuk dari hasil memendekkan beberapa kata menjadi beberapa huruf dengan menanggalkan satu atau beberapa huruf dari kata-kata tersebut.

**Penggalan** ialah proses pemendekan yang mengekalkan salah satu bagian dari leksem. Menurut Kridalaksana, ada 6 bentuk **penggalan**, yaitu:

- 1) Penggalan suku kata pertama dari suatu kata; misalnya: *Dok* = *Dokter*.
- 2) Pengekalan suku terakhir suatu kata, misalnya: *men* = *resimen*.
- 3) Pengekalan tiga huruf pertama dari suatu kata, misalnya: *Dep* = *Departemen*.
- 4) Pengekalan empat huruf pertama dari suatu kata, misalnya: *Brig* = *Brigade*.
- 5) Pengekalan kata terakhir dari suatu frase. misalnya: *harian* → *surat kabar harian*.
- 6) Pelepasan sebagian kata, misalnya: *takkan* → *tidak akan*.

**Akronim** ialah kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang sesuai dengan kaidah fonotaktik bahasa bersangkutan (Kridalaksana, 2001: 5). Dalam **KBBI**, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Sementara itu, John S Hartanto menjelaskan bahwa akronim adalah bentuk singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata ataupun gabungan kombinasi huruf dan suku kata dari deret kata dan yang ditulis serta dilafalkan sebagai kata yang wajar; contoh: *Mayjen* = *Mayor Jendral*.

**Kontraksi** yaitu proses pemendekan yang meringkaskan leksem dasar atau gabungan leksem, misalnya: *tak* dari kata *tidak*; *takkan* dari kata *tidak akan*.

**Lambang huruf** yaitu proses pemendekan yang menghasilkan satu huruf atau lebih yang menggambarkan konsep dasar kuantitas, satuan atau unsur, misalnya:

*g* → *gram*  
*cm* → *sentimeter*  
*Au* → *aurum*

Lambang huruf dapat disubklasifikasikan menjadi:

- a. Lambang huruf yang menandai bahan kimia atau bahan lain.
- b. Lambang huruf yang menandai ukuran.
- c. Lambang huruf yang menyatakan bilangan.

- d. Lambang huruf yang menandai kota/negara/alat angkutan.
- e. Lambang huruf yang menyatakan mata uang.
- f. Lambang huruf yang dipakai dalam berita kawat.

#### **D. Ihwal Singkatan dan Akronim dalam Bahasa Indonesia**

Singkatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) sama dengan istilah ‘kependekan’ dari Harimurti Kridalaksana dan masuk ke dalam kategori **abreviasi**. Singkatan atau kependekan itu merupakan hasil dari sebuah proses penyingkatan dan proses pemendekan.

Beberapa ahli menunjukkan perbedaannya dalam hal pengklasifikasian pemendekan. Pemerintah, cq Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melalui *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan* menyodorkan dua klasifikasi untuk **pemendekan**, yakni: a) singkatan (terdiri atas: (1) singkatan dan (2) lambang); dan b) akronim. Pendapat senada juga dikemukakan oleh JS Badudu (1983). *Singkatan* adalah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih; sedangkan *akronim* adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret yang diperlukan sebagai kata (Depdikbud, 1996: 391-392).

Menurut JS. Badudu (1983:86), singkatan dibagi dua, yakni *singkatan kata* yaitu kata yang disingkatkan dengan menggunakan huruf-huruf awal kata, kemudian dibaca huruf demi huruf. Contoh: SMP, SMU, TVRI. Singkatan kata yang dibaca sebagai kata, seperti ABRI, sekjen, Dirjen disebut *akronim*.

Dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (1980), bentuk kependekan itu terbagi ke dalam empat klasifikasi, yakni: (a) singkatan, (b) lambang huruf, (c) akronim, dan (d) satuan dasar sistem internasional.

Harimurti Kridalaksana (1993) mengklasifikasikannya ke dalam 3 jenis, yakni (a) singkatan, (b) penggalan, dan (c) akronim. **Singkatan** merupakan hasil penyingkatan, yakni proses pembentukan bahasa (baca: pembentukan kata) dengan cara pemendekan yang berupa huruf, baik yang dieja huruf demi huruf maupun yang tidak dieja huruf demi huruf. **Penggalan** merupakan hasil pemenggalan, yakni proses bahasa dengan cara pemendekan yang mengekalkan sebagian dari komponen pembentuknya. **Akronim**

merupakan hasil pengakroniman, yakni proses bahasa dengan cara pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain dari komponen pembentuknya atau yang menggabungkan bunyi dan suku kata atau kombinasi keduanya dari komponen pembentukannya yang ditulis dan diucapkan seolah-olah berstatus kata dan setidaknya harus memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia (Kridalaksana, 1993:167).

**Akronim** adalah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, suku kata, ataupun huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlakukan sebagai kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau pun huruf dan suku kata dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kecil.

## E. Pola-Pola Pembentukan Singkatan

Dalam *Pedoman Ejaan Yang Disempurnakan*, singkatan ini mempunyai beberapa bentuk. Bentuk-bentuk tersebut diikuti dengan kaidah penulisannya, seperti tampak dalam uraian berikut ini.

- 1) Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan satu titik.
- 2) Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti tanda titik.
- 3) Singkatan umum yang terdiri atas tiga huruf atau lebih diikuti satu tanda titik.

Sementara itu, menurut Kridalaksana, ada 16 bentuk singkatan dalam Bahasa Indonesia, yaitu:

- 1) Pengekalan huruf pertama tiap komponen; misalnya *RSPAD* → *Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat*. Bentuk ini penulis beri pola: H1-k1+ H1-k2+H1-kn
- 2) Pengekalan huruf pertama dengan pelepasan konjungsi, preposisi, reduplikasi dan preposisi, artikulasi dan kata; misalnya: *ABKJ* → *Akademi Bahasa dan Kebudayaan Jepang*.

- 3) Pengekalan huruf pertama dengan bilangan, bila berulang; misalnya: *P3K* → *Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan*.
- 4) Pengekalan dua huruf pertama dari sebuah kata; misalnya: *Ny.* → *Nyonya*.
- 5) Pengekalan tiga huruf pertama dari sebuah kata; misalnya: *Okt.* → *Oktober*.
- 6) Pengekalan empat huruf pertama dari suatu kata. misalnya: *Purn.* → *Purnawirawan*.
- 7) Pengekalan huruf pertama dan huruf terakhir dari sebuah kata; misalnya: *Ba.* → *Bintara*.
- 8) Pengekalan huruf pertama dan huruf ketiga; misalnya: *gn.* → *gunung*.
- 9) Pengekalan huruf pertama dan terakhir dari suku kata pertama dan huruf pertama dari suku kata kedua. Misalnya: *Kav* → *Kavaleri* → *ka-va-le-ri*
- 10) Pengekalan huruf pertama kata pertama dan huruf pertama kata kedua dari gabungan kata; misalnya: *a.d.* = *antedium*.
- 11) Pengekalan huruf pertama dan diftong terakhir dari kata; misalnya: *sai* → *sungai*.
- 12) Pengekalan dua huruf pertama dari kata pertama dan huruf pertama kata kedua dalam suatu gabungan kata. Misalnya: *swt.* → *swatantra* (*swa* dan *tantra*)
- 13) Pengekalan huruf pertama suku kata pertama dan huruf pertama dan terakhir suku kata kedua dari suatu kata; misalnya: *Bdg* → *Bandung* (*Ban-dung*)
- 14) Pengekalan huruf pertama dari tiap suku kata; misalnya: *dll.* → *dan lain-lain*
- 15) Pengekalan huruf pertama dan huruf keempat dari suatu kata; misalnya: *DO* → *depot*.
- 16) Pengekalan huruf yang tidak beraturan. Misalnya: *Ops* = *Operasi*.

## F. Pola-pola Pembentukan Akronim

Dalam buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* terdapat dua syarat untuk membentuk sebuah akronim, yaitu:

- a) jumlah suku kata pada akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata dalam bahasa Indonesia;
- b) akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan yang sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim.

Karakteristik akronim, paling tidak dapat ditelusuri melalui kaidah *bunyi* dan *suku kata* sebagai pembentuk akronim. Bunyi sebagai komponen pembentuk akronim dalam proses pengakroniman dapat dilihat dalam akronim *peltu* (*pembantu letnan satu*), misalnya. Bunyi /pel/ diambil dari kata pertama dan kedua, sedang bunyi /tu/

diambil dari bunyi ujung/akhir kata ketiga. Pemilihan bunyi /pel/ dan bunyi /tu/ cenderung hanya memperhatikan segi bunyi. Bandingkan dengan *peletu* atau *pelsa* atau *pelesa* yang dari segi bunyi tidak sedap di telinga.

Suku kata merupakan struktur yang terdiri atas satu atau lebih urutan fonem sebagai bagian penting dari kata (Depdikbud, 1996: 970). Suku kata merupakan komponen yang paling produktif dalam pembentukan akronim. Selain itu, akronim dapat terjadi pula melalui kombinasi unsur bunyi dan suku kata.

Menurut versi Pusat Bahasa dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* terdapat tiga jenis pola pembentukan akronim, yakni:

- 1) proses pemendekan yang menggabung-gabungkan huruf awal;
- 2) proses pemendekan yang menggabungkan suku kata; dan
- 3) proses pemendekan yang menggabungkan kombinasi huruf dan suku kata.

Menurut Kridalaksana, akronim sebagai bentuk proses pemendekan yang menggabungkan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai sebuah kata dan memenuhi kaidah fonotaktik bahasa Indonesia memiliki 16 bentuk seperti berikut ini.

- 1) Pengekalan suku pertama dari tiap komponen; misalnya: *KOMDIS* → *Komando Distrik*. (contoh tdk cocok)
- 2) Pengekalan suku pertama komponen pertama dan pengekalannya kata seutuhnya. Misalnya: *angair* → *angkutan air*
- 3) Pengekalan suku kata terakhir dari tiap komponen. Misalnya: *Menwa* → *Resimen Mahasiswa*.
- 4) Pengekalan suku pertama dari komponen pertama dan kedua serta huruf pertama dari komponen selanjutnya. Misalnya: *MABESAD* = *Markas Besar Angkatan Darat*. (tdk cocok)
- 5) Pengekalan suku pertama tiap komponen dengan pelepasan konjungsi. Misalnya: *ANPUDA* → *Andalan Pusat dan Daerah*.
- 6) Pengekalan huruf pertama dari setiap komponen kata. Misalnya: *ABRI* → *Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*.

- 7) Pengekalan huruf pertama pada setiap komponen frase yang berkombinasi dengan pengekalan dua huruf pertama dan terakhir pada komponen frase terakhir. Misalnya: *AIPDA* → *Ajun Inspektur Polisi Dua*.
- 8) Pengekalan dua huruf pertama dari setiap komponen frase. Misalnya: *UNUD* → *Universitas Udayana*.
- 9) Pengekalan tiga huruf pertama dari setiap komponen frase. Misalnya: *KOMWIL* → *Komando Wilayah*.
- 10) Pengekalan dua huruf pertama pada komponen pertama dan tiga huruf pertama pada komponen kedua suatu frase disertai pelesapan konjungsi. Misalnya: *abnon* → *Abang dan Non*
- 11) Pengekalan dua huruf pertama pada komponen pertama dan ketiga suatu frase serta pengekalan tiga huruf pertama pada komponen kedua. Misalnya: *Odmilti* → *Oditur Militer Tinggi*
- 12) Pengekalan tiga huruf pertama pada komponen pertama dan ketiga suatu frase serta pengekalan huruf pertama pada komponen kedua. Misalnya: *Nasakom* → *Nasionalis, Agama, Komunis*.
- 13) Pengekalan tiga huruf pertama pada setiap komponen frase disertai pelesapan konjungsi. Misalnya: *FALSOS* → *Falsafah dan Sosial*.
- 14) Pengekalan dua huruf pertama sebagai suku kata dari komponen pertama suatu frase dan tiga huruf pertama komponen kedua. Misalnya: *JABAR* = *Jawa Barat*.
- 15) Pengekalan empat huruf pertama tiap komponen disertai pelesapan konjungsi. Misalnya: *Agitprop* → *Agitasi dan Propaganda*.
- 16) Pengekalan berbagai huruf dan suku kata yang sukar dirumuskan. Misalnya: *UNJANI* → *Universitas Ahmad Yani*.

Beberapa ketentuan penulisan akronim sebagaimana yang tercantum dalam *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan* adalah sebagai berikut ini.

- 1) Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Contoh: **ABRI** (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), **LAN** (Lembaga Administrasi Negara), **PASI** (Persatuan Atletik Seluruh Indonesia).
- 2) Akronim yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari

deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya: **Akabri** (Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), **Bappenas** (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), **Iwapi** (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), **Kowani** (Kongres Wanita Indonesia).

3) Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata, seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya: **pemilu** (pemilihan umum), **radar** (radio *detecting and ranging*), **rapim** (rapat pimpinan), **rudal** (peluru kendali), **tilang** (bukti pelanggaran).

## G. Fenomena Singkatan dan Akronim dalam Bahasa Indonesia

Pembentukan akronim dan singkatan dimaksudkan untuk "mempersingkat" kata sebagai bentuk penghematan. Namun, harus diakui, pola pembentukannya seringkali tidak berpola ajeg dan tidak beraturan, terutama pembentukan akronim. Meskipun pemerintah, cq Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan bahkan beberapa ahli telah menetapkan kaidah pembentukan akronim, namun masyarakat pemakai bahasa seringkali secara kreatif menciptakan akronim-akronim baru yang sulit dilacak polanya.

Pada dasarnya penetapan sebuah kaidah dimaksudkan untuk memberikan pedoman yang jelas dan ajeg. Ketidakajegan pembentukan akronim yang berkaitan dengan pemendekan yang diambil dari suatu kata yang sama dapat kita cermati kasusnya. Mari kita cermati pembentukan akronim yang bersumberkan kata *olah raga*. Dari komponen tersebut ada yang menukil bentuk bunyi [*or*], misalnya untuk akronim **tapornas** (tabungan prestasi olah raga nasional), namun ada juga yang menjadi [*ora*] contohnya untuk akronim **gelora** (gelanggang olah raga) atau **menpora** (menteri pendidikan dan olah raga).

Berbicara tentang ketidakajegan juga berhubungan dengan sama-tidaknya pengambilan komponen dari kata pembentuk akronim. Sebagai contoh akronim **kapolwil** (kepala polisi wilayah). Bunyi [*ka*] diambil dari huruf pertama dan huruf terakhir dari deret kata pertama, yakni **kepala**. Sementara bunyi [*pol*] dan [*wil*] masing-masing diambil secara beraturan dari tiga huruf pertama dari deret kata berikutnya, yakni **polisi** dan **wilayah**. Dengan demikian, pengambilan komponen dari deret kata pertama

dan kata berikutnya tidak sama. Komponen pertama terbentuk dari bunyi awal [*k*] dan bunyi akhir [*a*], sedangkan komponen selanjutnya terbentuk dari **suku pertama** dan **bunyi pertama suku kedua**. Demikian juga dengan akronim *Pusdikif*. Infut pembangunnya diambil dari deret kata *pusat, pendidikan, dan infantri*. Pola pembentukan akronimnya tidak beraturan,. Bunyi /*pus*/ diambil dari suku kata pertama ditambah satu huruf pada deret kata pertama. Bunyi /*dik*/ diambil dari suku kata terakhir kata dasar pada deret kata kedua. Sementara bunyi /*if*/ diambil dari huruf pertama dan ketiga deret kata terakhir. Dari ketiga deret kata yang menjadi sumber infut bagi akronim *pusdikif*, yang paling menarik adalah kasus pengambilan bunyi dari deret kata terakhir, yakni /*if*/ yang semata-mata didasarkan pada pertimbangan "euphony". Bandingkan dengan *pusdikin*, misalnya.

Yang paling menarik adalah bentuk singkatan **AMD (ABRI Masuk Desa)**. Komponen awal /*a*/ diambil dari akronim **ABRI**, sedangkan huruf /*m*/ dan /*d*/ merupakan huruf pertama dari deret kata berikutnya. Jadi, infut singkatan AMD berupa paduan dari bentuk akronim dan kata. Pada kasus ini terjadi dua kali proses pembentukan abreviasi. Pertama, pembentukan akronim **ABRI**, kemudian akronim tersebut dijadikan infut bagi pembentukan bentuk singkatan **AMD**.

Akronim **galatama (gabungan sepak bola utama)** berasal dari dua komponen kata, yaitu *gabungan* dan *utama* dan satu kompositum, yaitu *sepak bola*. Dari komponen kata pertama diambil suku kata pertama [*ga*], dari komponen kompositum diambil suku kata terakhir dari pasangan kata yang kedua dari kompositum itu, yakni [*la*], dan dari komponen kata terakhir diambil dua suku kata terakhir, yaitu [*ta-ma*]. Pola pembentukan akronim tersebut agak sulit dipolakan sebagai sebuah kaidah yang bisa ajeg dan berlaku umum.

Selain itu akronim juga sering menjadi bahan pelesetan. Seperti *sebel* (seneng betul), *benci* (benar-benar cinta), *rinso* (rindu dan sono), *Rustam Lubis* (rusak tampang luar biasa), *jarum super* (jarang di rumah suka pergi-pergi). Demikian juga pada singkatan, seperti **3M** (menguras, menimbun, mengubur), **P7** (pergi pagi pulang petang pendapatan pas-pasan), **PBB** (Persatuan Babu-babu).

Maraknya akronim dewasa ini mengundang dua pendapat yang berkontroversi. Apakah fenomena tersebut merupakan sesuatu yang positif dalam perkembangan suatu bahasa atau sebaliknya, hal itu menjadi sebuah ancaman? Farid Gaban (2006)

mensinyalir maraknya akronim dan singkatan di media massa akan merusak Bahasa Indonesia. Betulkah? Kita perlu meneliti gejala bahasa tersebut serta keterpahamannya oleh masyarakat pemakai bahasa.

Akronim sebagai salah satu bentuk hasil pemendekan melalui proses akronimi menyoroti tiga faktor penting berikut. **Pertama**, unsur pembentuknya yang meliputi huruf, suku kata, dan bagian lainnya, bunyi, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. **Kedua**, hasil bentukan akronim secara fonetis menyerupai kata atau seolah-olah berstatus kata. **Ketiga**, berkenaan dengan istilah proses bahasa sebagai input-output; inputnya bukan leksem melainkan kata dan outputnya bukan kata melainkan akronim.

Bunyi (dalam hal ini bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap manusia) sebagai salah satu unsur pembentuk akronim berkaitan dengan syarat “*euphony*” atau sedap bunyi. Sebagai contoh tampak pada bentukan akronim “BRIPTU” yang berasal dari *Brigadir Polisi Satu*. Pemilihan suku kata awal [*bri*], fonem /*p*/, dan suku kata akhir [*tu*] semata-mata hanya didasarkan pada pertimbangan *euphony*.

Suku kata merupakan sebuah struktur yang dibangun oleh satu atau lebih fonem dan merupakan bagian penting dari struktur kata. Suku kata merupakan komponen yang paling produktif dalam proses pembentukan akronim

Pola/sistem pengakroniman yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli kebahasaan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut, terutama yang berkaitan dengan pola pembentukan dan pemaknaannya.

**Pertama**, kelaziman yang ditolak oleh frekuensi atau kebiasaan/keakraban pemakaiannya, banyak yang sudah tidak disadari pemakainya sebagai akronim. Para pemakai bahasa menganggapnya seolah-olah bentukan tersebut tergolong kata biasa, misalnya terjadi pada akronim *tilang*.

Kridalaksana membedakannya dengan **kontraksi**, yakni proses pemendekan yang terjadi sebagai akibat dari proses morfologis. Meskipun inputnya sama-sama berupa kata, namun outputnya berbeda. Dalam proses **pengakroniman**, keluarannya berupa bentukan baru yang disebut *akronim*; sedangkan dalam proses morfologis **pengkontraksian** keluarannya berupa *kata*.

**Kedua**, ketidakajegan kaidah pembentukan singkatan dan akronim memunculkan kreativitas-kreativitas pembentukannya yang terjadi di berbagai kalangan, baik di

lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta. Akibatnya, banyak bentukan-bentukan singkatan dan akronim yang menunjukkan gaya selingkung, yang hanya dipahami oleh lingkungan sendiri, misalnya bentuk singkatan dan akronim di lingkungan ABRI dan POLRI. Padahal kedua lembaga tersebut memiliki fungsi sosial dan fungsional yang sangat vital di masyarakat. Bentuk-bentukan gaya selingkung dimaksud boleh jadi akan menjadi salah satu faktor penghambat kelancaran dan keefektifan komunikasi.

## H. Penutup

Pola atau sistem pengakroniman dalam bahasa Indonesia memang tidak memiliki keajegan kaidah. Meskipun komponen pembentuknya bisa dilacak, yaitu bunyi, suku kata, dan atau kombinasi keduanya, namun pola kaidah pembentukannya seringkali sulit ditelusuri.

Beberapa catatan penting perlu diperhatikan sebagai dampak dari banyaknya singkatan dan akronim. **Pertama**, ledakan akronim memaksa para penentu kebijakan perencana dan pembakuan bahasa untuk selalu jeli dan cepat tanggap dalam menangani permasalahan bahasa, paling tidak yang berkenaan dengan peninjauan kamus secara periodik dan pengkodifikasian penemuan pola-pola baru yang belum terkodifikasikan.

**Kedua**, ledakan akronim yang tidak terlaacak pembentukannya sehingga dianggap sebagai kosakata baru oleh sebagian besar pemakai bahasa akan menyulitkan pihak lain yang akan mempelajari bahasa kita. Para pengajar BIPA (Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing) dihadapkan pada tantangan yang tidak kecil artinya dalam mengoptimalkan pembelajaran yang tepat guna dan berhasil guna, terutama yang berkenaan dengan pengenalan kaidah dan struktur. Kaidah dan struktur yang tidak ajeg bukan saja menyulitkan para pembelajar asing tetapi juga para pemakai bahasa itu sendiri.

**Ketiga**, banyak kosakata yang bersumber pada singkatan dan akronim tidak bisa dipahami kecuali di lingkungan yang sangat terbatas. Kosakata itu terjatuh menjadi jargon di lingkungan terbatas. Menyusutkan bahasa menjadi "dialek".

**Keempat**, banyak singkatan atau akronim dipakai secara bertumpang-tindih untuk pengertian yang berbeda-beda. Sebagai contoh, singkatan **PBB** bisa merujuk pada *Perserikatan Bangsa-Bangsa*, *Pajak Bumi Bangunan*, dan *Partai Bulan Bintang*.

## PUSTAKA ACUAN.

Alanudin, Dian. (2003). *Bentuk-bentuk Singkatan Bahasa Indonesia pada Iklan Mini*

- (*Studi Kasus Pada Iklan Mini Kompas Tanggal 1-31 Agustus 2002*). (Skripsi).  
Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia.
- Badudu, JS. (1983). *Membina Bahasa Indonesia Baku*. Bandung: Pustaka Prima.
- Badudu, JS. (1983). *Inilah Bahasa Indonesia yang Benar*. Bandung: Pustaka Prima
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Pedoman Umum Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: PPPB.
- Hartanto, John S. (1995). *Pedoman Umum Pembentukan Istilah dan Pedoman EYD*:  
Surabaya: Indah.
- Irawati, Lydia. (2007). *Singkatan dan Akronim dalam Media Chatting dan SMS (Analisis Komunikasi Teks dalam Internet dan Telepon Selular)*. Skripsi.
- Kridalaksana, Harimurti. (1992). *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, Harimurti. (2001). *Kamus Linguistik*. Edisi Ketiga. Jakarta: Pustaka Utama.
- Mabes POLRI. (2002). "*Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Polri*": Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol: Kep/53/X/2002. 17 Oktober 2002.
- Maulana, Sugeng. (1987). *Himpunan Singkatan dan Akronim*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moeliono, Anton M. (1985). *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan(Seri ILDEP).
- Notosusanto, Nugroho. (1979). "*Masalah Akronim dan Singkatan dalam Perkembangan Bahasa Indonesia*" dalam *Majalah Bahasa dan Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1980). *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rudianto. (1996). *Tinjauan Akronim dalam Bahasa Indonesia*. Skripsi. FPBS UPI..
- Wulandari, Arinda. (2007). *Penggunaan Akronim dan Singkatan dalam Bahasa Plesetan (Studi Deskriptif terhadap Bahasa Plesetan pada Acara Extravaganza dan Sketsa ABG)*. Skripsi FPBS UPI.